

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Arahan Penataan Permukiman di Sub DAS Sungai Cisadane Kelurahan Kebon Pedes disimpulkan sebagai berikut ini :

5.1.1 Karakteristik lingkungan permukiman Kelurahan Kebon Pedes di Sub DAS Cisadane

Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane pada umumnya bersifat menetap dengan lama tinggal lebih dari 10 - 20 tahun. Alasan pemilihan lokasi lebih dikarenakan mengikuti keluarga dan juga dekat dengan pusat perkotaan. Lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal tidak memiliki sertifikat karena merupakan lahan milik pengairan, sehingga masyarakat hanya memiliki hak guna atas bangunannya saja. Tingkat pendidikan masyarakat 37% hanya sampai pada lulusan tingkat SD dan lulusan SMP sebesar 26% , sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas SDM terkait dengan pekerjaan dan penghasilan masyarakat. Masyarakat yang menetap di bantaran Sungai Cisadane 51% bekerja pada bidang wiraswasta. Berdasarkan dari tabulasi silang dapat diketahui bahwa masyarakat yang bersedia direlokasi adalah masyarakat dengan mata pencaharian di bidang swiraswasta dengan tingkat pendapatan \leq Rp 1.000.000,00. Sedangkan yang tidak bersedia direlokasi adalah masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah Sungai Cisadane dengan status telah pensiunan.

Bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Cisadane mempunyai luasan yang sangat jauh dari standart rumah sederhana yaitu antara 6 – 34m². Kondisi luasan bangunan tersebut berpengaruh pada sistem pencahayaan dan penghawaan yang sangat kurang, sehingga terasa pengap karena minimnya cahaya maupun udara yang masuk dalam ruangan. Struktur bangunan 46% sudah berupa permanen, dengan didominasi KDB 100%, KLB 1-1,1, dan TLB 1. Hal ini dikarenakan masyarakat menggunakan lahan yang ada secara maksimal sebagai lahan terbangun. Selain adanya bangunan perumahan juga terdapat sarana lain yang berdiri di bantaran Sungai Cisadane antara lain sarana perdagangan dan jasa, peribadatan pendidikan, kesehatan, serta pemerintahan.

Meskipun pembangunan permukiman berada di bantaran sungai tetapi telah dilengkapi dengan adanya utilitas yang memadai. Antara lain adanya jaringan PDAM

untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan sumur komunal dan sumber mata air yang ada. Jaringan jalan berupa rabat beton dengan kondisi yang baik dimana bisa dilewati dengan kendaraan roda dua. Sebesar 15% masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane tidak memiliki kamar mandi sehingga secara swadaya membuat MCK umum. Sedangkan untuk pola pembuangan sampah telah terlayani oleh petugas kebersihan tetapi hal ini masih kurang membuat kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan sungai dikarenakan 86% langsung membuang sampah di Sungai Cisadane.

5.1.2 Tingkat Kekumuhan Pada Permukiman Kelurahan Kebon Pedes di Sub DAS Cisadane

Dari hasil penilaian kondisi permukiman pada Kelurahan Kebon Pedes bahwa kita dapat menyimpulkan untuk permukiman Kelurahan Kebon Pedes termasuk dalam kategori permukiman kumuh (nilai 2) seperti dapat dilihat pada sub bab 4.4 halaman 180 bahwa bangunan rumah dinding, atap, ventilasi termasuk dalam kategori kumuh, pembagian ruang, jumlah penghuni termasuk dalam kategori kumuh, untuk prasarana dasar drainase/got dan jalan lingkungan masuk dalam kategori kumuh. Dari sub variabel yang termasuk dalam kategori sangat kumuh yaitu genangan air hujan dan kepadatan bangunan, untuk prasarana dasar air bersih, sanitasi/MCK dan sampah

▪ Penanganan Bencana pada Sub DAS Cisadane

Pada kawasan dengan topografi landai (0-30%) maka perlu adanya penahan luberan air sungai ketika terjadi banjir dengan pembuatan tanggul. Tanggul yang digunakan adalah tanggul yang terbuat dari beton, hal ini dikarenakan wilayah penelitian telah menjadi kawasan padat bangunan sehingga sangat sulit melakukan pembebasan tanah apabila menggunakan tanggul dari urugan tanah. Pembuatan tanggul dilakukan pada batas bantaran Sungai Cisadane kedalaman sungai 5 – 15 meter mempunyai Garis Sempadan Sungai 15 meter dengan tepi sungai tidak bertanggul standart Menteri PU No. 63/PRT/1993, sehingga diharapkan tanggul tersebut mampu menahan adanya luberan air sungai ketika banjir agar tidak memasuki wilayah permukiman. Wilayah Sungai Cisadane yang berbatasan dengan permukiman perlu menggunakan tanggul agar air sungai tidak menggenangi permukiman ketika terjadi banjir, serta Adanya sumur resapan akan memberikan dampak berkurangnya limpasan permukaan. Air hujan yang semula jatuh keatas permukaan genteng tidak langsung mengalir ke selokan atau halaman rumah tetapi dialirkan melalui seng atau pipa yang kemudian ditampung kedalam sumur resapan. Akibat yang bisa dirasakan adalah air

hujan tidak menyebar ke halaman atau selokan sehingga akan mengurangi terjadinya limpasan permukaan.

5.1.3 Arahan Penataan Permukiman Kelurahan Kebon Pedes

Berdasarkan hasil analisis faktor bahwa faktor – faktor yang terbentuk yaitu kondisi prasarana dan sarana lingkungan, kondisi bangunan, karakteristik masyarakat, geografis dan karakter sungai Cisadane. Adapun konsep arahan penataan permukiman di Kelurahan Kebon Pedes di bagi menjadi dua konsep penataan antara lain konsep arahan penataan kondisi non fisik permukiman dan konsep arahan penataan kondisi fisik permukiman

Adanya peremajaan lingkungan permukiman kelurahan Kobon Pedes yang ada di sekitar sungai Cisadane, dilakukan dengan menilai kondisi eksisting bantaran sungai dilihat dari segi pemanfaatan ruang, ekologi sungai, serta aktivitas yang dilakukan manusia terhadap bantaran sungai. Dalam peremajaan ini ada penanganan permukiman di Kelurahan Kebon Pedes antara lain :Pembangunan baru di permukiman bantaran sungai tepatnya pada RW 12 dimana permukiman itu dengan kondisi bangunan yang semi permanen sehingga perlu dilakukan penataan permukiman dengan pembangunan rumah baru yan sesuai dengan nilai estetika lingkungan bantran sungai, Penataan muka bangunan pada bangunan yang berada di sepanjang bantarn sungai yang di sesuaikan dengan sempadan sungai sehingga ada nilai estetika pada Sungai Cisadane di Kelurahan Kebon Pedes, Internal relokasi ini dimana bangunan – banguna liar yang ada di sempadan rel kereta api yang tidak sesuai dengan legalitas tanah ataupun melanggar sempadan rel kereta api di wilayah RW 07

arahana penataan sarana dan prasana di Kelurahan Kebon Pedes merupakan acuan bagi penataan pembangunan dan pengembangan Kelurahan Kebon Pedes khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan, di tinjau dari segi kebutuhan dan kondisi sarana dan prasaranya yang sesuai dengan standart yang berlaku sehingga penataan tersebut untuk mewujudkan penataan di masa yang akan datang.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu diantaranya :

1. Responden hanya khusus pada bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Cisadane, sedangkan bangunan yang berada didalam garis sempadan Sungai Cisadane tidak dibahas.

2. Wilayah penelitian difokuskan hanya pada kawasan padat permukiman yang terletak di Kelurahan Kebon Pedes tidak pada sepanjang Sungai Cisadane secara Keseluruhan.

Sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian berikutnya yang berkaitan tentang wilayah sungai atau sejenisnya yaitu :

1. Pembahasan lebih detail tentang adanya rencana relokasi bangunan yang berada dibantaran Sungai Cisadane.
2. Pembahasan lebih detail tentang adanya konsep program peremajaan dan penataan bangunan yang ada di sempadan Sungai Cisadane agar tetap dalam koridor layak huni dan sehat.
3. Pembahasan lebih luas mengenai penataan secara keseluruhan pada daerah wilayah Sungai Cisadane yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir yang bertujuan menjaga ekosistem lingkungan sungai.

Arahan Penataan bantaran sungai bukan hanya tugas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, melainkan juga tanggung jawab pemerintah dalam proses pengawasan lingkungan sungai yang kondusif sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh aspek kehidupan. Maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Perlu adanya ketegasan serta implementasi tentang batasan Garis Sempadan Sungai terhadap masyarakat yang tinggal didaerah tersebut. Sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah agar tidak semakin banyak rumah yang dibangun di daerah baik bantaran maupun sempadan Sungai Cisadane dengan adanya pengendalian melalui IMB.
2. Dibutuhkan koordinasi dalam penataan lingkungan permukiman baik oleh pemerintah sebagai pihak pemberi ijin terhadap suatu bangunan dengan instansi penyedia fasilitas umum seperti PLN, PDAM dan jaringan telepon. Sehingga apabila ada permukiman yang tumbuh pada kawasan yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang tidak akan terlayani fasilitas tersebut.
3. Penanganan konservasi harus terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pengendalian banjir harus dimulai dari Kabupaten Sukabumi. Pengaruh hutan terhadap banjir sangat penting hanya jika tutupan hutan melingkupi sebagian besar daerah aliran sungai.
4. Penelitian ini hanya menentukan langkah awal penataan bantaran Sungai Cisadane, diharapkan pada masa mendatang dapat dilakukan penelitian yang

lebih detail berkaitan dengan penataan permukiman diluar garis sempadan sungai serta arahan lokasi pengembangan permukiman baru yang telah dilengkapi dengan sarana dan parasana yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.